

## Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh

Mustapa Kamil Alga Beruh  
Email: mustapakamilbroeh@gmail.com

### Abstract

An organized political party group, the aim is to gain political power, but lately in Aceh and local politics are increasingly in the spotlight for political science, Aceh is known as local politics or local politics which incidentally is as a communication tool and facilitator for the people of Aceh . However, in reality some Aceh political party contestations did succeed in achieving a task mandated in the law's objectives and party tasks. But in politics in Aceh recently experienced fragmentation that is so strong and very prominent and interesting to examine. Because many instruments and indicators influence the birth of the political fragmentation of Acehnese people, one of them is the political elite. In the course of the Acehnese people began to gradually realize the political behavior, until there were many political institutions or parties who wanted to separate from one political party to a new political party, and not infrequently the local political parties became a place for exploitation and vice versa to utilize the political situation, for example like local figures and elites who have an important influence and role in an area. However, however, the journey of local politics in Aceh is increasingly becoming apparent with its own local style and characteristics. Until much influence the order of local social life in Aceh.

**Keywords:** Political Parties, Society, Aceh

### Abstrak

Partai politik suatu kelompok yang terorganisir, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik, namun belakangan ini di Aceh dan politik lokal kian menjadi sorotan bagi pengait ilmu politik, Aceh yang di kenal dengan politik lokal atau politik lokal yang notabene adalah sebagai alat komunikasi dan fasilitator bagi masyarakat Aceh. Namun pada kenyataan memang beberapa kontestasi partai politik Aceh memang berhasil untuk mencapai sebuah tugas yang di amanatkan dalam undang-undang tujuan dan tugas partai. Tapi di politik di Aceh belakangan ini mengalami fragmentasi yang begitu kuat dan sangat menonjol dan menarik untuk di teliti. Karena banyak instrumen dan indikator yang mempengaruhi lahirnya fragmentasi politik masyarakat Aceh tersebut, salah satunya adalah elit politik. Dalam perjalanannya masyarakat aceh mulai belahan-lahan menyadari perilaku politik tersebut, hinga banyaknya lembaga atau partai politik yang ingin memisahkan diri dari partai politik satu ke partai politik baru, dan tidak jarang partai politik lokal tersebut menjadi tempat ajang pemanfaatan dan juga sebaliknya memanfaatkan situasi politik, misalkan seperti figur dan elit lokal yang mempunyai pengaruh dan peran penting di suatu daerah tersebut. Namun walaupun demikian perjalanan politik lokal di Aceh semakin hari semakin terlihat jelas dengan gaya lokal dan cir khasnya sendiri. Hinga banyak mempengaruhi tatanan kehidupan sosial lokal di Aceh.

**Kata kunci :** Partai Politik, Masyarakat, Aceh

## 1. Aceh MoU *Memorandum Of Understanding* dan lahirnya UUPA

Belum lekas terhapus bekas peristiwa tersebut, hingga sejarah kembali mengukir kesedihan bumi Aceh yaitu peristiwa tsunami pada 2004.<sup>1</sup> Namun seolah-olah alam ikut untuk menguji keikhlasan dan ketabahan kepada masyarakat bumi Aceh tersebut, yaitu gempa, yang berkekuatan luar biasa yang memutarakan keadaan, hingga menjadi duka yang amat terdalam, hingga melahirkan bekas luka dalam sejarah negeri ini tentunya. Semua mata di dunia tertuju ke bumi Aceh, untuk membantu masyarakat yang tengah duka oleh terjang tsunami tersebut, dengan peristiwa tersebut seolah-olah langsung dimanfaatkan oleh Presiden keenam Indonesia SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Namun di balik bencana tersebut mendapatkan hikmah yaitu untuk melakukan dialektik dengan separatisme di Aceh, upaya untuk berdiplomasi dalam mengakhiri kisruh, namun GAM tetap bersikeras untuk meminta Aceh pisah dari negara NKRI, oleh wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai delegasi dari pemerintahan menawarkan keistimewaan Otonomi khusus bagi provinsi Aceh dalam perundingan di waktu itu bertepatan di *Finlandia*, untuk mengeluarkan kebijakan tersebut adalah sebagai solusi dari kisruh yang panjang juga persoalan internal NKRI (*Internal Chaos*). Yaitu sering dikenal dengan sebutan *Memorandum Of Understanding* MoU, 15 Agustus 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM di *Helsinki, Finlandia*.<sup>2</sup>

MoU tersebut telah menghasilkan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan peraturan pemerintah No.20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal Aceh.<sup>3</sup> Menurut “Saddam Husien” pengamat politik lokal Aceh, “keberadaan partai lokal diperkirakan akan mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah lebih baik. Partai politik lokal Aceh diharapkan mampu menyerap aspirasi-aspirasi dan juga sebagai representasi masyarakat didaerah-

---

<sup>1</sup> Kerry Sieh, “Aceh pasca tsunami dan pasca konflik” *Mega Sesar Sunda dulu dan kini dan esok*” (Pustaka Laras, kerjasama dengan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies ICAIOS, terj. Arif B. Prasetyo (Jakarta, 2012) 195.

<sup>2</sup> Michael Morfit, “Aceh pasca tsunami dan pasca konflik” *Mengelola Risiko Aceh, kesepakatan Helsinki, dan perkembangan demokratis Indonesia*, Pustaka Laras, kerjasama dengan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), terj. Arif B. Prasetyo (Bali-Jakarta, 2012) 15-16.

<sup>3</sup> M.Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia* (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2015), 410.

daerah secara lebih tepat mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.”<sup>4</sup>

Dalam demokrasi kontemporer, partai politik merupakan instrumen utama rakyat untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik, begitu juga dalam berdemokrasi. Serta digunakan untuk memberikan pengaruh yang kuat dalam proses formulasi kebijakan publik. Selain pada itu demokrasi juga mempunyai hubungan dengan perdamaian, karena dalam lingkungan yang demokratis masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, dalam sistem politik Indonesia.

Dalam ihwal tersebut terlihat pada pasca penyelesaian konflik Aceh, dari pihak Indonesia, transisi demokrasilah yang menjadi dasar menuju proses bernegosiasi yang dilakukan para negosiator dengan para pejuang separatis, saat itu dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Pada perkembangan dinamika berpolitik dinegeri ini hingga implikasinya sangat berpengaruh pada partai politik lokal Aceh yang mengalami persurut dalam beberapa tahun belakangan, bahkan dari persentasi dari jumlah partai semakin berkurang, persoalan ini bisa dilihat dari populasi dan jumlah partai politik lokal saat ini yang ada, hanya berjumlah empat partai lokal saja yaitu Partai Aceh (PA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Sementara pada pemilu tahun 2009 yang lalu, ada enam partai politik lokal Aceh yaitu : Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

Pada pemilu 2009 partai Aceh atau di kenal dengan singkatan PA menjadi partai penguasa Aceh, karena mampu mengalahkan partai lokal lainnya, ini terbukti dengan kemenangan 90% suara dari kader-kader partai Aceh PA memimpin daerah masing-masing, baik sebagai bupati maupun walikota dan anggota dewan.

Pada tahun 2014 komisi independen pemilihan (KIP) menetapkan tiga partai politik lokal diprovinsi Aceh. Mereka adalah parpol peserta pemilihan umum tahun 2014 yang hanya berlaga diprovinsi Aceh. Yaitu partai daulat Aceh PDA, partai nanggroe Aceh PNA, dan partai Aceh PA. Ketiga partai ini bersaing dengan 11 partai

---

<sup>4</sup> Saddam Husien dalam Seminar Nasional, Oleh Pusat Kajian Politik. Universitas Gunung Lauser, pada 02 Agustus 2017.

nasional untuk mendapatkan kemenangan baik di eksekutif juga di legislatif. Namun lagi-lagi, partai Aceh PA mendominasi, meski diakui sedikit menurun perolehan suara mereka dibandingkan dengan pemilihan legislatif 2009 yang begitu banyak perolehan suara.<sup>5</sup>

Namun pada 2018 penetapan partai lokal Aceh kembali dalam berkompetisi 2019 nanti, yaitu partai PA, SIRA, PDA dan PNA. Artinya Jumlah ini akan terus mengalami penurunan dan penyusutan sebagai implikasi dari undang-undang pemilu serta belum terlaksananya fungsi partai politik secara baik. Bahkan banyak anggapan bahwa partai politik lokal Aceh belum menunjukkan *performance* yang memuaskan bahkan semakin hari semakin memperlihatkan elitisme lokal hingga fragmentasi politik masyarakat Aceh semakin terlihat skeptis terhadap perilaku politik lokal tersebut, ditambah lagi polarisasi sistem peraturan dan undang-undang partai, juga dinamika politik dalam berkompetisi dengan partai nasional, ini cenderung dimanfaatkan dalam komunikasi politik dengan lewat status elite dan cukup strategis bagi para politisi praktis untuk memenuhi hasrat dalam berpolitik partainya.

Tulisan ini akan membahas terkait kebijakan pemerintah terhadap identitas masyarakat Aceh, dengan wacana pembangunan sosial melalui partai politik lokal Aceh sebagai hasil dari implementasi kebijakan pemerintah, dengan wacana islam dan pembangunan Aceh. Secara eksplisit qanun misalnya, lebih dalam lagi Tulisan ini menggali tentang identitas masyarakat Aceh melalui fragmentasi politik masyarakat Aceh pasca perdamaian, yang penting untuk diketahui dari praktik realitas sosial politik maupun secara akademik. Deskripsi ini meliputi bagaimana kebijakan partai politik lokal, identitas dan wacana pembangunan Islam dipandang dari perkembangan sosial kultural Aceh melalui nalar ideologi, dan dukungan elite lokal.

Dalam Tulisan ini yang paling menjadi mendasar adalah aktor pembangunan upaya dari negosiasi, dan interpretasi ditegah para aktor kebijakan tersebut termasuk juga persepsi masyarakat dan tokoh masyarakat. Lebih lanjut di jelaskan bahwa dalam pendekatan proses negosiasi ini diupayakan untuk memperoleh informasi tentang partai politik lokal di Aceh,

---

<sup>5</sup> Catatan *Serambinews.com*, PA menoreh suara terbanyak, dari 81 kursi di DPRA, 29 kursi disabet PA atau setara dengan 35,80 persen. Sedangkan PNA, hanya memperoleh 3 kursi atau 3,70 persen. Begitu juga PDA, hanya mampu merebut satu kursi atau 1,23 persen.

Oleh penulis saya sendiri mencoba melihat persoalan partai politik lokal Aceh ini, yaitu berdasarkan sejarah (*history*), negosiasi, hingga pada perjalanan legitimasinya juga pada kebijakan partai politik lokal tersebut. Hasil MoU antara gerakan Aceh merdeka dan Pemerintah Indonesia, hingga sekarang menurunnya skeptisisme atau kepercayaan masyarakat Aceh pada partai politik lokal Aceh, karena fragmentasi politik masyarakat terhadap partai mempunyai interpretasi sesuai pada persepsi masing-masing individu terhadap partai tersebut. Tentunya dilahirkan dari nalar ideologis baru pada partai lokal dan gejala elitism lokal, hingga dinamika politik yang dihadapi partai tersebut.

Dalam tujuan dan fungsinya, sosialisasi, program-program, persaingan antara partai nasional, tindakan dalam mengimplemetasiannya, juga proses negosiasi dari para aktor kebijakan politik lokal yang dominan kurang sesuai dimasyarakat lokal, sehingga partai lokal tersebut mengalami degradasi dan skeptisme oleh masyarakat lokal. Sehingga fragmentasi politik masyarakat semakin berkembang, oleh karena itu perlu adanya pemahaman terlebih dahulu terkait, Asal mula partai politik.

Partai politik suatu kelompok yang terorganisir, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik, oleh karenanya juga bagaimana tentang partai politik lokal, dan kajian yuridisnya, hingga tentang pembentukan partai politik lokal. Namun menganalisis kebijakan pemerintah terhadap partai politik lokal juga merupakan sesuatu langkah yang sangat perlu diperhatikan pada prosesnya. Bagaimana proses negosiasi yang dilakukan para aktor untuk mewujudkan kebijakan yang ideal, lalu bagaimana partai politik dalam perkembangan sistem kenegaraan Indonesia dan bagaimana bentuk negara Indonesia.

Pada praktiknya dengan pendekatan teoritis antara karakter negara kesatuan dan federal sudah sangat tipis menurut Michael Finner. Perlu pemahaman bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, apakah sistem desentralisasi sebagai solusi dalam melancarkan proses demokrasi demi mencapai pembangunan yang berikan tanggung jawab dibawah pemerintahan daerah?

Pada pendekatan keadilan distributif bagi masyarakat sangat penting ditelaah, juga ideologi partai yang sebagai pengetahuan tidak didasari sehingga (*Taken For Granted*), seolah-olah mencuat pada pertanyaan publik tentang kebenaran secara kolektif yang pasti, oleh dengan adanya partai sebagai ideologi baru dan bagaimana peran para elit lokal Lalu bagaimana Hasil pemilihan umum di Aceh Tenggara, dari

tahun ke tahun dan peraturan pemilihan umum, analisis hasil pemilihan umum di Aceh Tenggara?

Dari penjelasan diatas maka penulis ingin mengamati terhadap fragmentasi politik masyarakat Aceh pasca konflik. Pada studi persepsi masyarakat di sebuah desa di Aceh yaitu Desa Kuta Lang-lang terhadap perkembangan Politik Lokal Aceh. Identitas dan wacana pembangunan Islam sebagai perkembangan sosial di Aceh, karena ada partai yang memang berorientasikan atas dasar sosial keagamaan, adat budaya, nasionalisme lokal. Sehingga fragmenisme masyarakat menjadi politik berkembang subur di Aceh, pada realitas yang terjadi memisahkan diri dari partai politik lainnya.

## **I. Kerangka Teoritis**

Untuk menganalisis fragmentasi politik masyarakat Aceh terhadap kebijakan partai politik lokal yang muncul pasca penanda tanggan nota kesepahaman MoU antara pemerintah republik Indonesia dengan gerakan Aceh merdeka "*The government of Indonesia*" pada tanggal 15 Agustus 2005 di *Helsinki, Finlandia*. yaitu sebagai implementasi dari kebijakan pemerintahan terhadap perdamaian, juga pemerintah sebagai aktor dan agensi partai politik lokal Aceh tersebut. Maka dalam membantu untuk mendiskripsikan, memahami, serta menjelaskan analisis ini, saya menggunakan beberapa teori-teori yang cukup relevan dengan diskusi dan kajian ini. Seperti pernyataan pada beberapa literatur bahwa, keberadaan partai politik lokal sebenarnya sudah ada sebelumnya, bahkan partai lokal itu sendiri dulunya berkembang di Indonesia.

## **2. Partai Politik Lokal**

Menurut Faisal Riza, direktur pusat kajian politik universitas Islam negeri Sumatera Utara bahwa, "partai politik lokal di Indonesia telah ada sejak pelaksanaan pemilu pertama kali digelar di Indonesia tahun 1955.<sup>6</sup> Namun pada perkembangannya partai politik lokal tersebut kemudian tenggelam oleh kebijakan pemerintah sebagai aktor kebijakan yang tentunya tidak memberi ruang hidup bagi partai politik lokal." Artinya dinamika partai politik lokal di Indonesia mengalami naik surut.

---

<sup>6</sup> Faisal Riza, dalam Pusat Kajian Politik, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Partai Politik Lokal Aceh, 2016.

Menurut Herbert Feith, “disebut sejumlah partai politik pada pemilu 1955 tersebut adalah “ kelompok kecil yang bercakupan daerah” yaitu: Gerinda – Yogyakarta, Partai Persatuan Daya – Jawa Timur, AKUI – Madura, Partai Rakyat Desa (PRD) – Jawa Barat, Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM) – Jawa Barat, R. Soedjono Prawirosoedarso dkk – Madiun, Gerakan Pilihan Sunda (GPS) – Jawa Barat, Partai Tani Indonesia – Jawa Barat, Raja Keprabonan dkk – Cirebon Jawa Barat, Gerakan Banteng – Jawa Barat, Partai Indonesia Raya (PIR) – Nusa Tenggara Barat Lombok, PPLM Idrus Effendi – Sulawesi Tenggara.<sup>7</sup>

Seperti kita ketahui daerah khusus Aceh misalkan, partai politik lokal diperbolehkan untuk hadir berdampingan dengan partai politik nasional. Keberadaan partai politik lokal ini sendiri adalah hasil atau realisasi dari negosiasi para aktor yang memformulasikan kebijakan, tentunya yaitu untuk pemulihan hak sosial politik masyarakat Aceh, khususnya bagi para mantan anggota GAM dan demi memenuhi ha-hak politiknya.<sup>8</sup>

Menurut Abdul Mukhtie Fadjar, menjelaskan dalam buku tulisanya tentang “partai politik,” bahwa secara umum partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara. Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa partai politik lokal adalah kumpulan dari sekelompok masyarakat yang jaringannya terbatas pada suatu daerah atau wilayah tertentu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara dengan cara yang sah.

### **3. Karakteristik Partai Politik Lokal**

Menurut Sigit Pamungkas, dalam buku tulisannya “Partai Politik”, karakteristik partai lokal disetiap negara pada dasarnya berbeda-beda baik dari sistem partai politiknya ataupun dari tujuan partai lokalnya. Terdapat dua pola sistem kepartaian politik lokal, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem partai politik lokal

---

<sup>7</sup> Abdul Mukhtie Fadjar. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, ed. (Malang: Setara Pres. 2013), 67.

<sup>8</sup>*Ibid.*

terbuka, partai lokal berhak mengikuti kompetensi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang bersifat nasional melalui pemilu nasional.<sup>9</sup>

Sementara dalam sistem partai lokal tertutup, partai politik lokal hanya dapat berkompetensi pada pemilu lokal. Pada sistem yang tertutup, jika partai lokal berkehendak memiliki pengaruh politik ditingkat nasional maka ia harus berkolaborasi dengan partai politik nasional. Maka partai Aceh sendiri penulis menyimpulkan adalah termasuk pada kategori sistem partai tertutup. Alasannya ialah karena selama ini partai Aceh hanya membatasi perihal dalam persoalan internal Aceh.

Dari berbagai pendapat diatas menjelaskan bahwa partai politik lokal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat Aceh dalam mengelola dan memajukan daerahnya serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh dalam berbangsa dan bernegara dengan cara yang baik sesuai dengan pancasila, Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **4. Tujuan dan Fungsi Partai Politik Lokal**

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh terdapat tujuan partai politik lokal Aceh. Menurut Lawrence Sullivan, “tujuan partai politik lokal berbeda-beda,” namun secara umumnya dapat dikategorikan tiga macam sebagai Hak minoritas, Memperoleh otonomi dan Mencapai kemerdekaan.<sup>10</sup> Menurut “Miriam Budiarjo” bahwa fungsi partai politik didalam negara demokrasi yaitu, “pertama sebagai sarana komunikasi politik, kedua sebagai sarana sosialisasi politik, ketiga sebagai sarana rekrutmen politik dan keempat sebagai sarana pengatur konflik.<sup>11</sup>

#### **5. Elit Lokal Dalam Sosialisasi Politik**

Dalam defenisi yang dikemukakan oleh Budiarjo diatas yaitu sebagai komunikasi politik, sosialisasi, rekrutment dan mengatur konflik. Dalam interpretasi penulis sendiri bahwa ini merupakan proses strategi pada komunikasi elit politik,

---

<sup>9</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketata negaraa Indonesia*.Edisi revisi.(Malang: Setara Press.2013), 65-67.

<sup>10</sup> Abdul Mukthie Fadjar. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, 67

<sup>11</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 405-409.

strategi dalam sosialisasi dengan pemanfaatan “*Figure Elite*”, hingga mencapai pada rekrutmen keanggotaan dan simpatisan dan mengatur konflik dengan memberikan sentimen isu kepada publik dan di kemas atas dasar sosialisasi.

Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula mengubah kebudayaan politik. Untuk dapat menyampaikan atau mentransmisikan pandangan, nilai, sikap, dan keyakinan-keyakinan politik diperlukan sarana atau agen-agen sosialisasi politik, seperti “elite lokal”. Terdapat enam macam sarana atau agen sosialisasi, yaitu 1. keluarga, 2. kelompok bergaul atau bermain, 3. sekolah, 4. tempat kerja, 5. media Massa, dan kontak politik langsung.<sup>12</sup>

Elite politik lokal sebagaimana penjelasan sebelumnya sangat berperan pada kelangsungan sosialisasi partai sebagai alat komunikasi politik. Tentunya ini menambah relasi dalam pencapaian hasil konsumsi dari produktivitas politik yang praktis oleh aktor dan elite politik, baik dalam penyampaian visi dan misi, begitu juga pada penyampaian tujuan dan peran partai politik dalam berkompetisi, karena strategi pada *elitism* yang cenderung menjadi populer yang sering dimanfaatkan para politik praktis. Cenderung pada pencapaian atau gerakan seperti tergambar diatas biasanya di deskripsikan sebagai bentuk resistensi melawan pusat atau pemerintahan yang selama masa sebelumnya menghimpun dan menggerakkan semua kekuatannya untuk menundukkan daerah baik di dalam ataupun diluar arena politik formal.<sup>13</sup> Implikasinya ekonomi politik dirasa lokal menjadi tidak berkembang dan langsung tidak stabil sesuai realitas kebutuhan masyarakat.

Keadaan ini menimbulkan berbagai bentuk resistensi kultural, misalnya gerakan akar rumput dan menyerukan nilai-nilai (*local wisdom*) yang memerlukan pencarian alternatif untuk pembangunan daerah, hingga fungsi partai sebagai pereda konflik. Dalam bahasan sederhana, masyarakat sipil di konsep sebagai wadah perlawanan yang

---

<sup>12</sup> Malik, Pengertian Sosialisasi Politik Lengkap, “*Pengertian Sosialisasi Politik, Tipe-tipe & Sarana Sosialisasi Politik*” 11 November 2017. <https://mengakujenius.com/pengertian-sosialisasi-politik-tipe-tipe-dan-sarana/>

<sup>13</sup> Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Jurnal Ilmu Politik” *Politik lokal di Indonesia dari Otokratik ke Reformasi Politik*, AIPI., No.21,(2010), 8.

memungkinkan pemunculan kembali identitas daerah yang tercerabut selama rezim otokratis berkuasa, dilihat pada pengamatan analisis peristiwa pra MoU Aceh.<sup>14</sup>

Sementara Mosca menyebutkan, bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, dan menggunakan kekerasan.<sup>15</sup> Elit juga bisa berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya (*financial*) dan pandai (*smart*). Namun dapat menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas yaitu *elite* dan lapisan bawah *non-elite*. Elit politik dapat digolongkan orang-orang yang merupakan berhasil atau yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Namun bagaimana hubungan elitism lokal politik pada proses sosialisasi politik lokal di Aceh yang selalu di manfaatkan oleh politisi partai? Bahwa elit yang tersebar pada sektor berbagai profesi dan latar belakang kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda, itu umumnya mampu menggarap dukungan dari masyarakat baik secara relasi sosial dan refleksifitas finansial dengan kehadiran ditegah elit politik tersebut, tentunya akan menunjukkan bahwa dukungan dari elit tersebut sangat berkontribusi dan pengaruh besar dalam politik praktis, ini merupakan strategi aktor politik dalam pencapaian proses sosialisasi, dan komunikasi partai dalam berpolitik.

Seperti terjadi pada realitas partai politik lokal Aceh, semua partai lokal di Aceh memanfaatkan relasi dan komunikasi elit lokal dalam pencapaian sosialisasi politik partai. Seperti partai Aceh PA yang juga menggunakan elit GAM (gerakan aceh merdeka) pada awal proses sosialisasi partai tersebut, bahkan realitas sosial politik hingga sampai sekarang masih menggunakan strategi pada pemanfaatan komunikasi politik melalui elit lokal, sehingga PA masih mendominasi di beberapa daerah di kabupaten di Aceh pada saat pemilihan umum.

Saya lebih tertarik meminjam istilah Gun-Gun Heryanto “*Game Theory*” dia menyatakan bahwa mengusung dan mendukung adalah dua hal yang berbeda. Biasanya pada ihwal dan Istilah ini yang sering jika diletakkan pada komunikasi politik melalui elit oleh aktor politik lokal tersebut salah dalam interpretasi pengusungan dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Alim Bathoro, “Studi Ilmu Pemerintahan” *Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, riset.umrah. No. 13, (2013), 117-118.

pendukungan. Mengusung artinya mencalonkan seseorang menjadi kandidat menuju proses pemilihan, baik sendiri maupun gabungan. Sementara mendukung belum tentu sampai formal kandidasi dan bisa menjadi skenario permainan politik “*Political game*” yang belum tentu menjadi *happy ending* berkongsi.<sup>16</sup>

Sementara masyarakat umum yang pendidikan politiknya kurang atau tidak paham akan komunikasi politik antara elit dan partai cenderung menggunakan nalar pemahaman bahwa dukungan ini adalah sebuah pengusungan yang final, jika dilihat dalam realitas politik lokal Aceh tersebut juga sama dengan minimnya pemahaman tentang strategi pada sosialisasi yang dilakukan oleh aktor politik yaitu elit yang sebelumnya ini merupakan hasil dari komunikasi politik dalam pencapaian tujuan politik lokal tersebut. Bahkan tidak jarang agama menjadi alat dalam pencapaian komunikasi politik oleh beberapa partai demi kepentingan politiknya seperti partai PDA, pengurusnya partai tersebut yang mengklaim partai tersebut satu-satunya partai yang berbasiskan Islam.<sup>17</sup>

## 6. Persepsi Tentang Ideologi Partai Politik

Robbins Stephen, menjelaskan tentang sebuah persepsi, menurutnya persepsi merupakan proses yang digunakan oleh individu dalam mengelola hingga menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.

Menurut penulis ketika pengamatan di lapangan pra penelitian, nalar ideologis yang menjadi alasan utama. Bagaimana hubungan persepsi dengan nalar ideologi menjadi alasan utama? Ideologi pada setiap partai politik tentunya mempunyai orientasi yang jelas, walaupun tidak dijelaskan secara tertulis atau hanya di ungkapkan secara lisan oleh para aktor politisi dari partai politik lokal tersebut, sehingga menimbulkan persepsi melalui nalar ideologi masyarakat.

Pada proses pendewasaan politik lokal Aceh menurut penulis sendiri cenderung menjadikan ihwal berpolitik yang beragam, hingga fragmentasi politik masyarakat politik masyarakat Aceh menjadi fragmentasi atau pemisahan dengan organisme partai dari satu hingga mendirikan organisme baru, namun pada orientasi berpolitik yang cenderung sosial kultural lokal yang menjadi sorotan dari visi-misi dan fungsi-

---

<sup>16</sup> Gun-Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 43.

<sup>17</sup> Dilihat dari argumentasi dari anggota partai pada kempaye dan pertemuan anggota pengurus beberapa waktu lalu yang mengklaim partai PDA adalah partai satu-satunya partai lokal Aceh yang berazaskan dan berbasiskan Islam.

tujuan partai tersebut. Diluar ini adalah strategi berpolitik menuju legitimasi secara *defacto* atau dukungan sosial dari masyarakat lokal, hingga pencapaian legitimasi secara konstitusional. Dalam fragmentasi politik masyarakat Aceh tentunya melahirkan wacana persepsi dari masyarakat, karena fragmentasi politik masyarakat alasan yang jelas, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini sangat berkaitan dengan nalar ideologi juga yang dilakukan oleh para aktor politik yang sangat signifikan dengan realitas sosial politik Aceh, dengan memanfaatkan elit lokal. Cenderung memberikan sebuah narasi pada *elitism* lokal sebagai strategi politik praktis. Tentunya dari beragamnya partai lokal Aceh memiliki karakteristik masing-masing pada partai tersebut.

Menurut Samuel Becker, ideologi adalah cara kita mepersepsi tentang dunia kita dan diri kita, dapat mengontrol apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang alami bagi diri kita. Hal ini juga indentik dari karakteristik partai politik lokal Aceh tersebut menunjukkan secara tidak langsung ideologi pada partai, seperti dilihat pada kader atau anggota partai yang cenderung berperilaku pada tindakan dan perbuatan yang berorientasi apa yang selalu di lakukan oleh mereka, sehingga ini membangun sebuah framing masyarakat menjadi ideologi pada partai tersebut, menjustifikasi misalkan seperti partai Aceh PA, yang cenderung menggunakan alat komunikasi politik yaitu elite lokal seperti tokoh adat yang kental mengetahui tentang budaya lokal, sehingga membangun persepsi masyarakat partai tersebut adalah partai yang cenderung berorientasikan pada adat dan budaya lokal Aceh sebagai ideologinya. Ini menunjukkan nalar ideologi dapat merekonstruksi wacana persepsi dan sangat pengaruh pada orientasi ideologi partai tersebut, tentunya dalam menyukseskan tujuan berpolitik partai.<sup>18</sup>

Martin Seliger, memahami ideologi sebagai sistem simbol atau kepercayaan yang berhubungan dengan tindakan sosial atau praktik politik. Namun menurut Seliger pada interpretasi nya sebagai sebuah transisi menuju konsepsi ideologi yang inklusif. Bahkan ideologi besar dunia yang seperti Marxisme yang cenderung radikal pada sistem kepercayaan politik yang menuntut perubahan kelas sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dilihat pada realitas saat pemilihan umum daerah Aceh Tenggara. adat dan budaya lokal aceh yang selalu di gayangka oleh para pratisi Partai PA, sehingga politik identitas menjadi sebuah wacana pada berpolitikan di daerah Aceh tenggara, dilihat juga pada beberapa tokoh politisi Partai Aceh, yang cenderung setiap kampanye juga bersoasialisasi menggunakan pakaian budaya lokal Aceh.

<sup>19</sup> Jhon B. Thomson, *Studies in the Theory of Ideology*, Terj. Haqul Yaqin, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 114.

Dalam dinamika politik elit lokal yang cenderung mampu memberikan sebuah pandangan yang lebih mementingkan suksesi pada tujuan politiknya. Politik pasca Orde Baru merefleksikan logika dan mekanisme politik baru bagi masyarakat dan elit di semua level ke politik. Politik baru menggambarkan resistensi terhadap politik lama yang otokratis, represif, dan memusat (*centralism*). Interpretasi atas politik baru juga dipahami sebagai lahirnya *polycentrism* atas konsekuensi dari desentralisasi. Polisentrisme diartikan secara sederhana sebagai perjuangan kolektif masyarakat atau daerah untuk menolak gagasan atau penguasa lama yang dianggap telah melemahkan identitas dan kekuasaan mereka atau sebuah kelompok.<sup>20</sup>

## 7. Kesimpulan

Fungsi dan tugas dari partai politik lokal sudah cukup jelas, namun pada kenyataannya partai politik lokal Aceh dan Partai lainnya, masih banyak yang belum sesuai pada fungsi dan tugasnya sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan, terkadang memang partai politik hanya mengedepankan kebutuhan partainya tetapi bukan pada rakyat, karena latar belakang lahirnya partai banyak bahkan beragam. Tentu hal tersebut membuat pendewasaan berpolitik, dan menjadi ilmu baru dalam politik juga, juga sangat disayangkan plan form dalam politik di Aceh, masih perlu banyak di benahi dan tanpa harus mengorbankan masyarakat baik secara kelembagaan politik, pemerintahan dan masyarakatnya.

---

<sup>20</sup> Mohan G & Stokke K. 2000. *Participatory development and empowerment: the dangers of localism*. (Third World Quarterly, 2000), 247-268.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, ed. Malang: Setara Pres. 2013.
- Alim Bathoro, “Studi Ilmu Pemerintahan” *Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, riset.umrah. No. 13, 2013.
- Catatan *Serambinews.com*, PA menoreh suara terbanyak, dari 81 kursi di DPR, 29 kursi disabet PA atau setara dengan 35,80 persen. Sedangkan PNA, hanya memperoleh 3 kursi atau 3,70 persen. Begitu juga PDA, hanya mampu merebut satu kursi atau 1,23 persen.
- Faisal Riza, dalam Pusat Kajian Politik, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Partai Politik Lokal Aceh*, 2016.
- Gun-Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Jhon B. Thomson, *Studies in the Theory of Ideology*, Terj. Haqul Yaqin, Yogyakarta: IRCiSoD, 2014
- Kerry Sieh, “Aceh pasca tsunami dan pasca konflik” *Mega Sesar Sunda dulu dan kini dan esok*” (Pustaka Laras, kerjasama dengan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies ICAIOS, terj. Arif B. Prasetyo, Jakarta, 2012.
- Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Jurnal Ilmu Politik” *Politik lokal di Indonesia dari Otokratik ke Reformasi Politik*, AIPI., No.21,2010.
- M.Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Malik, Pengertian Sosialisasi Politik Lengkap, “*Pengertian Sosialisasi Politik, Tipe-tipe & Sarana Sosialisasi Politik*” 11 November 2017. <https://mengakujenius.com/pengertian-sosialisasi-politik-tipe-tipe-dan-sarana/>
- Michael Morfit, ”Aceh pasca tsunami dan pasca konflik” *Mengelola Risiko Aceh, kesepakatan Helsinki, dan perkembangan demokratis Indonesia*, Pustaka Laras, kerjasama dengan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), terj. Arif B. Prasetyo, Bali-Jakarta, 2012
- Mohan G & Stokke K. 2000. *Participatory development and empowerment: the dangers of localism*. Third World Quarterly, 2000.
- Saddam Husien dalam Seminar Nasional, Oleh Pusat Kajian Politik. Universitas Gunung Lauser, pada 02 Agustus 2017.